

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman reformasi guna meminimalisir kegiatan penyimpangan pada seluruh lini termasuk di lini Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dibutuhkan transformasi sudut pandang penyelenggaraan otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang asal mulanya terpola sentralistik berubah menjadi terdesentralisasi yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab besar daerah dari adanya penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah serta pada sisi lain pemerintah daerah mempunyai otoritas guna mengontrol dan mengelola rumah tangga dengan berdaulat. otoritas besar memerlukan kontrol maksimal jika tidak ada kontrol maka akan ada timbul celah penyimpangan dan kecurangan penggunaan wewenang yang kedepannya akan berakibat pada kehilangan kerugian negara, serta kesengsaraan bagi masyarakat. Guna meminimalisir praktik kecurangan pada penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan beberapa unsur manajemen yang baik, yakni persiapan, penyusunan, dan pelaksanaan, selain itu diperlukan kontrol sinergitas unsur supaya cita-cita pada suatu institusi dapat tercapai. Inspektorat provinsi sebagai pengendali dalam hal ini institusi pengawas provinsi menjadi tonggak bertugas menjadi pemimpin dan pelindung saat kegiatan sedang dilaksanakan terutama dalam mendapatkan bantuan anggaran, hal ini pada aplikasi asas dekonsentrasi di suatu area provinsi dan memiliki kepentingan pada zona administrasi guna menjalankan otoritas negara yang diberikan pada pimpinan provinsi dimana sebagai wakil pimpinan pemerintah yang ada didaerah.

Gubernur menjadi pimpinan wilayah di zona provinsi berguna sebagai pimpinan Pemerintahan yang berada di wilayah, serta memfasilitasi dan mempersingkat birokrasi aplikasi fungsi dan tugas Pemerintahan yang didalamnya terdapat pemeliharaan dan kontrol pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan kota maupun kabupaten. Pelaksanaan tugas pembantuan adalah gambaran suatu tata cara dalam sistem penempatan pemerintah pada wilayah setempat guna melaksanakan pembangunan serta kegiatan pemerintahan dan diharuskan memiliki tanggung jawab untuk terus berkomunikasi pada saat pelaksanaannya namun tetap menggunakan standar penilaian yang sudah digunakan sebelumnya yang memuat unsur ekonomis, sesuai dengan prosedur, efektif dan efisien. Maka dari itu perlu dibentuk instansi pengawas internal yang memiliki tugas menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 kemudian diturunkan lebih jelas pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 berisi tentang penguatan dan kontroling. Serta terdapat penjelasan secara rinci dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 dimana dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah dibutuhkan sebuah pengawasan agar satuan kerja perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.

Pada area wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi otoritas satuan kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pengaruh vital guna memperbaiki pegawai pemerintahan untuk menjalankan amanat dari pemerintah yang telah di emban serta mengawal proses pembangunan agar citra birokrasi yang bebas dari korupsi dapat tercipta kepercayaan dari masyarakat.

Pekerjaan utama dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah untuk mengakomodasi dan memudahkan gubernur pada saat mengawal kegiatan pemerintah di wilayahnya. Maka tujuan dari adanya kontrol yang dilakukan inspektorat di era otonomi daerah guna memperbaiki citra pemerintahan dengan menunjukkan pelayanan optimal pada publik sehingga publik dapat merasa puas dan percaya pada kinerja pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 yang memuat tentang implementasi fungsi dan tugas pengawasan yang didalamnya terdapat unsur kinerja, keuangan. Monitoring perlu dilakukan secara komprehensif sejak perancangan hingga setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dilakukan.

Inspektorat dikomandoi seorang inspektur yang ditempatkan di unit institusi pengawas guna menjalankan tugas internal dalam manajemen untuk mengaktualkan pemerintahan bersih dan baik. Dalam hal ini ikut menjaga kedisiplinan dan kelancaran serta mengawal program pemerintahan yang berkaitan dengan uang dan kekayaan yang berada di suatu wilayah.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Mengacu pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2011 mengenai pedoman kegiatan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Pemantauan tindak lanjut merupakan buah dari pengamatan auditor alam hal ini, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai koordinator dan penghubung inspektorat lain guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat.

Inspektorat memberikan sebuah saran atau yang biasa dikenal dengan rekomendasi sesuai dengan objek yang sedang ditangani. Standar prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemegang wilayah menyusun konsep langkah tindak lanjut yang kemudian dikonsultasikan dengan kepala sub bagian Evaluasi dan Pelaporan
2. Pemegang wilayah mengkomunikasikan konsep langkah tindak lanjut dengan obrik, dalam hal ini pejabat.petugas yang menangani TLHP maksimal 5 hari kerja.
3. Obrik menyerahkan data.bukti dukung pelaksanaan rekomendasi dari hasil temuan berdasarkan konsep langkah tindak lanjut. Metode penyerahan data dukung bisa dilaksanakan melalui metode berikut ini :
 - Penyerahan langsung oleh obrik, penyerahan tidak langsung misalnya via POS/Kurir/E-mail yang sesuai dengan SOP pengelolaan surat masuk yang berlaku di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Batas waktu penyerahan data/bukti dukung sesuai dengan Permen PAN-RB No 09 Tahun 2009 tentang maksumal 60 hari setelah LHP diterima
4. Pemegang wilayah melakukan verifikasi data/bukti dukung pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan. Maksimal 30 menit.
5. Apabila data/bukti dukung pelaksanaan tindak lanjut tidak sesuai dengan konsep langkah tindak lanjut, pemegang wilayah menyusun konsep surat Inspektur kepada Obrik yang berisikan permintaan data/bukti dukung pelaksanaan TL hanya yang berbanding terbalik dengan konsep langkah tindak lanjut maksimal 30 hari kalender setelah kegiatan penyerahan data

dukung pelaksanaan rekomendasi TLHP terakhir. Selanjutnya ,engajukan konsep surat kepada Kasubbag Evalap , maksimal 2 jam.

6. Kasubbag Evalap memeriksa dan memberikan persetujuan konsep surat Inspektur kepada obrik dengan cara memberikan paraf pada konsep surat tersebut. Maksimal 30 menit.
7. Sekretaris memeriksa dan memberikan persetujuan konsep Surat Inspektur kepada Obrik dengan cara memberikan paraf pada konsep surat tersebut. Maksimal 30 menit.
8. Inspektur memeriksa dan menanda tangani surat kepada Obrik maksimal 30 menit.
9. Sub Bagian Administrasi dan Umum mengirimkan surat Inspektur kepada Obrik sesuai dengan SOP Pengelolaan Surat Keluar
10. Apabila data/bukti dukung pelaksanaan Tindak Lanjut sudah sesuai dengan konsep langkah tindak lanjut, Pemegang Wilayah menyusun konsep Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP sesuai dengan Form IPPJT.EVAL. SOP.01.IK.01.FM.07 maksimal 30 menit
11. Kasubbag Evalap dengan Sekretaris Obrik yang bersangkutan (dapat diwakili oleh Pejabat/Petugas yang Menangani TLHP) menandatangani Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP maksimal 30 menit

(sumber : www.inspektorat.jatengprov.co.id diakses pada hari jumat 15 mei 2020)

Guna mengetahui evaluasi berjalan dengan baik sesuai dengan capaian dan target suatu insituri sudah sesuai dengan rancangan awal maka dibutuhkan suatu standarisasi penilaian seperti berikut ini :

Tabel 1.1.
Standar Pengukuran Kinerja Pemerintah

NO	Rentang	KATEGORI
1	76–100%	Baik
2	56–75 %	Sedang
3	≤ 55 %	Kurang

Sumber : Lakip Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2018

Tanggung Jawab ajab prestasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014-2018 dapat dipaparkan dalam penjabaran dari capaian tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil pengukuran prestasi yang telah dibuat dalam suatu laporan kinerja yang didalamnya termuat faktor penyalaras dari capaian kegiatan yang telah telaksana sebelumnya

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang membawahi 35 kabupaten kota di Jawa Tengah bertugas memberikan rekomendasi terhadap temuan laporan hasil pengawasan pada seluruh Kabupaten dan kota di seluruh Jawa Tengah. penyelesaian 100% dengan rincian yang tersebar di 2 Kabupaten Kota dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Dari 20 kabupaten kota mendapatkan persentase di atas 75%. Dan sisanya mendapatkan hasil persentase sebesar dibawah 75% hal ini menandakan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian tindak lanjut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebesar 80% dari jumlah

pemantauan hasil TL rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2 di berikut ini:

Tabel 1.2.
Report Temuan Pemeriksaan Tahun 2014 - 2018 :

NO	Obyek Pemeriksaan	Kode Temuan (*)			Jumlah Pemeriksaan dan Rekomendasi		Status TL dan Persentase					
		1	2	3	Obyek Pemeriksaan	Rekomendasi Pemeriksaan	S	PS	D	PD	B	PB
1.	Kabupaten Banjarnegara	103	39	36	178	231	214	92,64%	17	7,36%	0	0,00%
2.	Kabupaten Banyumas	70	42	39	151	235	177	75,32%	26	11,06%	32	13,62%
3.	Kabupaten Batang	99	57	61	217	319	195	61,13%	105	32,92%	19	5,96%
4.	Kabupaten Blora	196	25	38	259	454	297	65,42%	19	4,19%	138	30,40%
5.	Kabupaten Boyolali	103	33	36	172	209	209	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6.	Kabupaten Brebes	120	36	20	176	292	63	21,58%	167	57,19%	62	21,23%
7.	Kabupaten Cilacap	109	76	32	217	290	249	85,86%	0	0,00%	41	14,14%
8.	Kabupaten Demak	100	32	32	164	259	204	78,76%	53	20,46%	2	0,77%
9.	Kabupaten Grobogan	130	28	18	176	311	265	85,21%	35	11,25%	11	3,54%
10.	Kabupaten Jepara	124	30	3	186	237	228	96,20%	9	3,80%	0	0,00%
11.	Kabupaten Karanganyar	115	70	24	209	321	308	95,95%	6	1,87%	7	2,18%

12.	Kabupaten Kebumen	106	40	18	164	241	146	60,58%	85	35,27%	10	4,15%
13.	Kabupaten Kendal	109	66	48	223	351	212	60,40%	135	38,46%	4	1,14%
14.	Kabupaten Klaten	63	36	21	120	147	144	97,96%	3	2,04%	0	0,00%
15.	Kabupaten Kudus	64	15	28	107	138	137	99,28%	1	0,72%	0	0,00%
16.	Kabupaten Magelang	98	32	26	156	208	140	67,31%	25	12,02%	43	20,67%
17.	Kabupaten Pati	90	51	60	201	242	191	78,93%	0	0,00%	51	21,07%
18.	Kabupaten Pekalongan	89	25	41	155	212	182	85,85%	0	0,00%	30	14,15%
19.	Kabupaten Pemalang	108	50	30	188	260	143	55,00%	93	35,77%	24	9,23%
20.	Kabupaten Purbalingga	99	73	45	217	312	300	96,15%	0	0,00%	12	3,85%
21.	Kabupaten Purworejo	78	63	20	187	261	256	98,08%	4	1,53%	1	0,38%
22.	Kabupaten Rembang	87	37	22	146	216	179	82,87%	6	2,78%	31	14,35%
23.	Kabupaten Semarang	76	25	34	135	178	137	76,97%	2	1,12%	39	21,91%
24.	Kabupaten Sragen	81	40	26	147	211	200	94,79%	11	5,21%	0	0,00%
25.	Kabupaten Sukoharjo	92	29	34	155	208	193	92,79%	15	7,21%	0	0,00%
26.	Kabupaten	87	54	26	167	248	185	74,60%	62	25,00%	1	0,40%

	Tegal											
27.	Kabupaten Temanggung	85	35	33	153	215	209	97,21%	6	2,79%	0	0,00%
28.	Kabupaten Wonogiri	88	59	45	192	236	162	68,64%	3	1,27%	71	30,08%
29.	Kabupaten Wonosobo	83	56	3	178	249	95	38,15%	126	50,60%	28	11,24%
30.	Kota Magelang	71	81	23	175	226	226	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
31.	Kota Pekalongan	75	33	35	143	197	130	65,99%	12	6,09%	55	27,92%
32.	Kota Salatiga	71	31	37	139	186	177	95,16%	9	4,84%	0	0,00%
33.	Kota Semarang	135	28	23	186	288	267	92,71%	5	1,74%	16	5,56%
34.	Kota Surakarta	61	31	13	105	144	102	70,83%	0	0,00%	42	29,17%
35.	Kota Tegal	60	50	28	138	202	101	50,00%	67	33,17%	34	16,83%
	TOTAL	3225	1508	1058	5892	8534	6623	77,60%	1107	12,97%	804	9,42%

Keterangan Kode Temuan (*):

1. Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan
2. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern
3. Temuan 3E

Keterangan Status Temuan :

1. S : Selesai
2. PS : Persentase Selesai
3. D : Dalam Proses
4. PD : Persentase Dalam Proses
5. B : Belum Selesai
6. PB : Persentase Belum Selesai

Sumber : www.simwas.jatengprov.go.id

Data dapat kita lihat pada periode Tahun 2014 s.d 2018 masih banyak rekomendasi yang belum selesai ditindak lanjuti sebanyak 9,42%, dari 8534 temuan audit, yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut 12,97% rekomendasi, dari data rekapitulasi temuan pemeriksaan per LHA, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut masih banyak angka-angka penyelesaian yang masih rendah dan tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian yang telah ditetapkan yaitu 60 hari serta tidak sesuai dengan target penyelesaian dengan rata rata diatas 80% dalam hal ini dapat dibuktikan melalui data yang telah didapat maka dari itu penelitian ini secara khusus memiliki fokus pada tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih banyak belum dilaksanakan dalam hal ini penelitian terkait dengan auditing proses hingga pelaporan hasil pemeriksaan. Dalam hal ini terdapat faktor faktor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut sehingga membuahkan hasil ketidak konsistensian yang didapat dalam kegiatan ini.

Melihat penjelasan dan fakta di atas maka peneliti memiliki arah melaksanakan penelitian tentang manajemen evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang masih memiliki kategori kurang dan cukup. maka pertanyaan penelitian yang diambil yaitu **“Mengapa masih banyak angka tindak lanjut hasil pemeriksaan ItProv JaTeng yang belum diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan?”** yang kemudian didapatkan suatu rumusan ke dalam sebuah judul **“ANALISIS PENERAPAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INPEKTORAT**

PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF TEORI EVALUASI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi persoalan yang ada pada penelitian sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya capaian target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan diatas 80% dari kinerja inspektorat sebesar 100%.
2. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengalami peningkatan.
3. Kecilnya jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SOP yang telah ditentukan yakni 60 hari.

1.3 Perumusan Masalah

Berlandaskan uraian dari latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hasil evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan hasil yang diharapkan

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

1.6 Kajian Teori

Pada saat pelaksanaan penelitian dilakukan dibutuhkan sebuah teori yang memegang peranan sangat penting. Saifudin Azwar (dalam Sugiyono, 2008:39) mendefinisikan “teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian. Semakin banyak kejadian yang dapat dijelaskan oleh semakin sedikit pernyataan berarti teorinya semakin baik.” Berdasarkan penjelasan uraian diatas dapat diketahui bawasannya teori bukan hanya sebuah rangkaian pengertian yang terkumpul dari beberapa buku, namun memiliki sebuah sasaran lebih penting yakni guna mempresentasikan dasar yang berlandaskan pada fenomena yang sedang diamati.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dibutuhkan guna mendasari penelitian yang dapat disajikan sebagai berikut ;

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manan dan Mannayong (2017) tentang “*Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kota Makassar*”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya keterkaitan pemeriksaan, pengujian dan tindak lanjut dengan pengawasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Melalui pengawasan ini membuahkan hasil bahwa Inspektorat Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasannya telah berjalan dengan baik dari segi pemeriksaan, pengujian maupun tindak lanjut pengawasan.
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lusiana & Prihatiningtias (2017) tentang *Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil*

Pemeriksaan. Penelitian ini membahas proses tindak lanjut pengawasan serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Melalui proses tindak lanjut pengawasan dan upaya menghasilkan OPD tidak memutuskan arah serta capaian waktu menyelesaikan TLHP dengan jelas. Hal tersebut dapat terjadi karena kepala OPD tidak memberikan sebuah pekerjaan ekstra pada seluruh bawahannya, dan kepala OPD memiliki suatu peraturan guna menyelesaikan TLHP yang diselaraskan pada keadaan penyelesaian. Segala cara pada prosedur untuk menyelesaikan TLHP seperti membuat majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Seluruh cara sudah dilaksanakan oleh majelis ini untuk menyelesaikan kerugian yang ada di setiap daerah dengan cara memberikan surat keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berada di setiap wilayah.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pongoliu dan Saerang (2017) tentang “Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo”. Observasi kali ini dengan cara pendekatan kualitatif studi kasus. Pada saat keberjalanannya terdapat hambatan yang harus di tempuh oleh organisasi perangkat di Provinsi Gorontalo ketika menyelesaikan TLHP BPK dimana satu persoalannya adalah Penjabat ASN berkaitan dengan sebuah temuan yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap menyelesaikan TLHP BPK yang berakibat pada molornya

waktu penyelesaian, hal ini dapat terjadi karena hasil pemeriksaan yang telah diketahui tidak segera di selesaikan. Dibutuhkan sebuah komitmen yang besar dari seluruh pimpinan yang ada guna mendukung agar TLHP ini dapat segera. Cara-cara sudah ditempuh oleh pemerintah daerah setempat untuk mempercepat penyelesaian TLHP ini yaitu sinergitas untuk mempercepat penyelesaian TLHP antar institusi dan memberikan hukuman pada pejabat yang dengan sengaja memperlambat penyelesaian TLHP.

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keenan, 2008:4) menjelaskan administrasi publik merupakan cara menggunakan kekuasaan yang telah di delegasikan dan beri arahan guna merumuskan, mengaplikasikan serta mengendalikan hasil peraturan umum. Melainkan Keenan menjabarkan arti administrasi publik menyatakan cara negara memiliki pengaruh sebagai institusi penting pencipta peraturan yang didalamnya terdapat suatu langkah yang kemudian dapat diaplikasikan pada rakyat. Berdasarkan penjelasan pakar tersebut administrasi publik adalah ilmu dan seni untuk menjalankan amanah yang telah diamanahkan yang memiliki hasil guna memecahkan persoalan yang didalamnya terdapat koreksi secara finansial, institusi dan kekuatan yang dimiliki

Terdapat pakar lain dalam hal ini David H Rosenbloom (dalam Pasolong, 2007:8) menunjukkan bahwa administrasi publik ialah memanfaatkan ketentuan yang semestinya dan cara-cara tata kelola, hukum dan politik guna

memaksimalkan tujuan negara pada aspek eksekutif dan legislatif pada fungsi keteraturan dan jasa pada masyarakat.

Dari banyaknya penjelasan mengenai administrasi publik, dapat ditarik sebuah inti mengenai administrasi publik adalah kegiatan pemerintah yang di dalamnya melaksanakan kegiatan politik dan melayani masyarakat untuk mencapai tujuan negara dengan mendasarkan pada kebijakan negara.

Keberadaan Inspektorat menjadi salah satu upaya untuk memecahkan masalah publik pada bidang pengawasan dengan adanya Inspektorat di setiap wilayah memudahkan institusi melakukan pelayanan publik dengan keterjangkauan yang mudah dan cepat. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan pelayanan pada bidang pengawasan ini perlu dukungan pemerintah, masyarakat dan swasta

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan cara pandang melihat suatu kondisi yang digunakan manusia dalam menyelesaikan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Thomas Khun (dalam Syafiie, 2006:26) menjelaskan sudut pandang merupakan metode, hakekat, asas metode guna mengatasi persoalan yang dihadapi di manusia. Menurut Suwitri (2009:16) titik temu berdasarkan sasaran melalui proses panjang yang didalamnya terdapat perpindahkn pola ilmu pengetahuan, tingkah laku manusia yang mulai memiliki atensi pada persoalan yang besar. Terdapat 5 paradigma yang kemudian dikategorikan menjadi 3 sudut pandang besar dalam administrasi publik yakni OPA, NPM dan NPS. Kemudian Nicolas Henry (pada

Suwitri, 2008:16-20) menjelaskan terdapat lima cara pandang administrasi publik, yakni:

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926).

Sudut pandang ini dicetuskan oleh F.J Goodnow yang menjelaskan bawasannya pemerintah mempunyai beberapa peran yang berbeda yakni peran administrasi dan politik dimana peran administrasi berhubungan pada keinginan negara menjalankan fungsi politik, sedangkan peran politik berhubungan pada penetapan peraturan dan keinginan bagi negara. Peran ini dibedakan berlandaskan pembagian kekuasaan. Dalam hal ini lembaga eksekutif lebih mengarah pada pelaksanaan peraturan sedangkan peran lembaga legislatif dengan sinergitas lembaga yudikatif menjalankan peran politik. Lokus administrasi negara pada cara pandang ini adalah birokrasi pemerintah.

2. Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937).

Sudut pandang ini memusatkan lokus pada birokrasi pemerintah dan fokusnya pada asas administrasi negara dalam rangka pengaplikasian capaian rencana negara supaya efisien serta efektif. Pakar yang memiliki peran pada sudut pandang ini adalah L.H Gullick dan Lyndall Urwick melalui pegenalan asas POSDCORB.

3. Administrasi sebagai Ilmu Politik (150-1970)

Kemajuan tentang dikotomi ANE dan ilmu politik menciptakan beberapa penolakan karena tata kelola ANE tidak mungkin

kekosongan nilai serta apolitis, tetapi pada perancangan peraturan ANE mengemban amanat mencetuskan kondisi yang tentram pada tata kelola institusi negara sedangkan ilmu politik mengemban amanat mencetuskan kondisi tentram pada rakyat supaya dapat membangunkan pergeseran politik serta sosial yang kedepannya mendapatkan hasil kesuksesan pengaplikasian peraturan. Cara pandang ini erat kaitannya dengan induk disiplin ilmu ANE yang berada pada ilmu politik dan berusaha membangun hubungan terstruktur dengan ilmu politiik.

4. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1956-1970).

Belainan pada sudut pandang sebelumnya yang melihat bawasannya ilmu politik ialah induk disiplin pada ilmu ANE, sudut pandang ini melihat ilmu administrasi merupakan telaah campuran konsep organisasi dengan ilmu manajemen. Prinsip-prinsip organisasi ini merupakan asas umum yang berlaku dimana saja maka dalam sudut pandang ini terdapat keinginan guna memisahkan asas yang terdapat di insitusi privat maupun umum.

5. Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970)

Sudut pandang ANe telah memiliki lokus sendiri, yakni institusi umum, kemudian fokus ANe berlandaskan administrasi murni belum di identifikasi. ANe kemudian menggunakan pengembangan teori organisai dan metode terapan dalam ilmu tata kelola guna memperkuat kemajuan ilmu ANe. Kemajuan Ilmu ANe semakin

mendekatkan hubungan antar organisasi dengan privat dalam hal sosial dan teknologi, kemudian kaitannya dengan ilmu politik ialah cara perancangan peraturan memaksimalkan keterlibatan sarjana ANe pada bidang Peraturan, ekonomi politik dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, Evaluasi organisasi termasuk dalam paradigma New Public Service karena di dalam paradigma tersebut merubah cara kerja institusi. NPS merupakan salah satu carayang digunakan untuk membenahi kerja pemeritahan dalam segi evaluasi dengan mengaitkan berbagai *Stakeholder* secara terbuka dalam mebenahi kerja pemerintah.

1.6.4 Manajemen Publik

Penjabaran tata kelola menurut Stoner &Wankel (dalam Pasolong, 2007:82), mengatakan bawasannya tata kelola senaturalnya merupakan cara persiapan, penyusunan, kekuatan dan penanganan cara pegawai serta mengerahkan semua kekuatan lain untuk tergapainya keinginan institusi yang sudah di rencanakan.

Shafritz dan Russel (dalam Pasolong, 2007:82) menjelaskan tata kelola ialah berkaitan pada manusia didalamnya mengemban tanggung jawab guna melaksanakan tugas di suatu institusi serta terdapat cara menlaksanakan institusi tersebut, yakni memaksimalkan alat yang dimiliki guna tercapainya rencana institusi. Bawasannya tata kelola merupakan hal erat dengan instusi pemerintahan. Overman (dalam Keban, 2004&85). Menjelaskan bahwa tata kelola tidak ilmu manajemen, walaupun amat rentan bagi ilmu manajemen. Tata kelola tidaklah menganalisis kebijaka, tidaklah juga administrasi publik, menggambarkan beban

celah pola pandangan indikator rasional di satu orang, dan pandangan politik kebijakan di orang satunya. Tata kelola publik merupakan suatu ilmu penyimpangan oleh fase biasa di suatu institusi, serta menjadi campuran dari fungsi tata kelola, manusia, kekuatan finansial, berita serta politik di pandangan lainnya. Berlandaskan argument dari Overman tersebut, OTT, Hyde dan Shafritz (1991), menjabarkan tentang tata kelola umum dan peraturan umum adalah bagian administrasi publik yang bertumpukan. Namun guna memisahkan bagian dengan lugas sehingga bisa dijelaskan bawasannya peraturan umum menggambarkan penyimpanan serta kabel, kemudian tata kelola umum cara kerja computer dan distribusi pada perangkat komputer. bawasannya tata kelola publik adalah cara mengorganisir pegawai dan alat amanat peraturan umum.

Berlandaskan penjabaran yang telah dijelaskan tentang tata kelola publik dapat ditarik benang merah bawasannya tata kelola merupakan ilmu interdisipliner yang memuat gabungan dari fungsi-fungsi manajemen. Dimana tata kelola merupakan cara mengerahkan sumber yang dimiliki secara materi dan finansial sesuai amanat peraturan namun tata kelola umum dan peraturan umum tetap menjadi tumpang tindih.

Dalam penelitian ini termasuk manajemen pengawasan karena manajemen pengawasan merupakan mekanisme yang telah direncanakan guna mengoptimalkan pengawasan di seluruh lini kehidupan Manajemen pengawasan didasarkan pada suatu asumsi bahwa. Pengawasan membutuhkan tujuan yang jelas dan terukur. Manajemen pengawasan ialah cara manajemen ketika mengatur pegawai yang berfokus pada hasil dalam hal ini terdapat kegiatan komunikasi secara

menyeluruh dan terus menerus sesuai dengan visi yang telah diatur dan berbagai pendekatan serta selain itu dapat menjadi sebuah motivasi guna memperoleh tujuan di suatu institusi.

1.6.5 Konsep Evaluasi

Evaluasi menurut Anderson (dalam Arikunto, 2006:1) melihat evaluasi ialah suatu cara menetapkan tujuan yang sudah didapat berdasarkan aktivitas yang dirancang guna menjamin tergapainya keinginan. Maksud pengertian tersebut ialah evaluasi merupakan sebuah gambaran nyata yang telah terlaksana yang selanjutnya akan diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak pada saat pelaksanaannya jika kegiatan tersebut tidak berhasil maka kedepannya akan dilakukan perumusan upaya perbaikan dan penyesuaian hingga kegiatan tersebut berhasil. Sejalan dengan hal tersebut menurut Stufflebeam (dalam Arikunto, 2006:1) menjabarkan evaluasi ialah sketsa, pengidentifikasian dan memberi fakta yang berguna terhadap penentuan pilihan pada penentuan jalan cepat pilihan.

Dunn (2000:608) menjelaskan dengan lugas evaluasi dapat disamakan dengan penjabaran, penilaian skor, serta tata kelola guna menjelaskan efek kegiatan. Dalam hal secara rinci evaluasi berkaitan pada fakta yang bernilai. Pemberian angka dan penilaian ini merupakan cara yang harus diambil untuk memperbaiki kegiatan yang ada. Penjabaran perihal sudah dijabarkan para pakar sehingga dapat di jelaskan bahwa evaluasi ialah suatu cara yang sedang dilaksanakan orang guna menilai capaian kegiatan. Capaian kegiatan ini diukur

melalui efek yang didapatkan. Terdapat dua metode unsur didalamnya, yaitu efektifitas dan efisiensi.

Mengevaluasi suatu kegiatan dibutuhkan spesifikasi guna menilai kesuksesan kegiatan masyarakat. Perihal tata kerja kinerja ketika membuahakan fakta yang didalamnya ada spesifikasi evaluasi menurut Dunn (2003:610) sebagai berikut:

Tabel 1.3
Indikator Evaluasi Menurut Dun

Nomor	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektivitas	Apakah hasil telah tercapai?
2.	Kecukupan	Berapa banyak hasil yang tetapkan guna mengatasi masalah?
3.	Pemerataan	Apakah kebermanfaatn disalurkan menyeluruh merata kepada masing-masing objek pemeriksaan?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kegiatan mendapatkan tanggapan dari masing-masing kabupaten kota ?
5.	Ketepatan	Apakah output yang diharapkan sudah bermanfaat ?

Sumber : Dunn (2003:610)

Unsur-unsur tabel tersebut menjadikan tolok ukur dari evaluasi karena pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan yang dirancang oleh W.N. Dunn berhubungan pada seluruh unsurnya.

1.6.5.1 Tujuan Evaluasi

Arah evaluasi kegiatan menurut berdasarkan Setiawan (1999:20) ialah agar mudah dikenal capaian perkembangan dan hambatan yang ada ketika melaksanakan kegiatan serta penilaian yang dipelajari guna memperbaiki kegiatan dimasa depan. Arah evaluasi guna mengetahui sebesar apa ketumpang tindihan dan keinginan pada suatu kegiatan di masyarakat,, selanjutn terdapat

fase antisipasi mengatasi permasalahan. Di tarik benang merah evaluasi berarah mengidentifikasi kesalahan dan meminimalisir kesalahan.

berdasarkan Arikunto (2002:13) melihat dua arah evaluasi, yakni arah khusus dan arah umum, arah khusus ditujukan pada permasing-masing unsur sedangkan arah umum ditujukan pada penyeluruhan, sedangkan berdasarkan Crawford (2000: 30) arah evaluasi adalah :

1. Guna melihat arah yang dirancang telah terwujud saat kegiatan atau belum.
2. Guna memberi pengamatan pada perilaku secara obyektif.
3. Guna melihat keahlian serta penentuan kepatutan.
4. Memberi timbal balik pada program ketika dilaksanakan.

Hakikatnya arah evaluasi memberikan guna memetakan serta merancang untuk menentukan dan membuat kegiatan biasanya dimulai ketika salah satu cara mengumpulkan fakta secara terstruktur. Pada penjelasan ini mengemukakan bahwa tujuan evaluasi, yaitu melihat realisasi dari program yang telah dilaksanakan, kemudian memperoleh data dengan sistematis, untuk memberikan penilaian secara obyektif dan kemudian pada akhirnya dapat mejadi umpan balik bagi para pembuat keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya.

1.6.5.2 Jenis Evaluasi

Jenis evaluasi ialah jenis design evaluasi yang dicetuskan para ilmuan evaluasi yang telah disamakan berdasarkan nama pencetusnya. Jenis ini sebagai acuan pengukuran. kemudian, para pakar evaluasi menyebarkan evaluasi

berdasarkan kegiatan yang hendak dipresentasikan serta kewenangan ini disebut pendekatan. Terdapat beberapa jenis evaluasi, yaitu :

1. Evaluasi CIPP

Menurut Stufflebeam, 1983 (dalam Farida Yusuf, 2000:66) bahwa cara yang berfokus di pengambil pilihan guna membantu administrator ketika menentukan pilihan. Administrator merancang evaluasi dikatakan cara yang melukiskan, mendapatkan serta memberi fakta bermanfaat guna mengukur jalan pintas pilihan evaluasi dikatakan sebagai suatu proses yang menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai alternatif keputusan. Pencetus menginisiasi tata cara bekerja guna memberikan pelayanan bagi manajer serta administrator guna mengawal beberapa pilihan.

2. Evaluasi UCLA

Alkin (dalam Farida Yusuf, 2000) menjabarkan konsep evaluasi senada pada jenis CIPP penjabaran evaluasi dengan lugas terhadap penentuan pilihan fakta yang akhirnya terdapat laporan secara ringkas dari fakta yang berguna dalam penentuan jalan pintas. Alkin juga menjabarkan lima jenis evaluasi, yaitu :

- a. Penilaian, menyampaikan fakta perihan situasi.
- b. Perencanaan, mendukung pilihan kegiatan agar mendapatkan hasil cepat guna mencukupi kegiatan.

- c. Pengaplikasian, menyediakan fakta setelah diluncurkan pada sasaran yang telah dirancang.
- d. Pengembangan membagi fakta perihal fungsi, kerja, hasil yang didapat serta terdapat persoalan baru yang tidak direncanakan.
- e. Sertifikasi, membagi fakta perihal inti kegiatan.

1.6.5.3. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki peranan penting dalam sejumlah kegiatan. Menurut W. N. Dunn (2005: 609-610) menjelaskan peran evaluasi, yakni :

- a) Evaluasi membagi fakta nyata berlandaskan sumber bertanggung jawab tentang cara kerja pengontrolan, yakni : smelihat dan memberi skor serta peluang sudah tercapai melewati koreksi masyarakat. Makna ini berarti evaluasi menjabarkan sejauh lama sasaran tertentu yang sudah didapat.
- b) Evaluasi membagikan bantuan penjabaran dan masukan berlandaskan pilihan sasaran. Kritik terhadap nilai melalui pertanyaan secara terstruktur sesuai dengan prosedur yang kemudian didalamnya terdapat ketepatan yang akhirnya dianalisis dan pengujian berdasarkan cara yang berasalkan pada nilai atau akal sehat..
- c) Evaluasi memberikan kedudukan saat pengaplikasian penjabaran lainnya memuat perancangan persoalan serta saran fakta perihal keidakmampuan cara kerja pengawasan sehingga bisa mendapatkan fungsi rancangan masalah ulang.

Berdasarkan pernyataan di atas fungsi evaluasi memiliki arti sangat penting guna mencapai tujuan, berdasarkan adanya gambaran yang telah terjadi maka evaluasi dapat melakukan langkah selanjutnya terwujudnya sasaran berdasarkan sasaran yang direncanakan.

1.6.6 Konsep Pengawasan

Penjabaran tentang mengawasi menurut Siagian (1990:135) merupakan cara observasi daripada pelaksanaan di semua institusi agar terjaminnya seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan rancangan awal. berdasarkan Nawawi (1994:8) mengawasi ialah cara pengendalian serta evaluasi dilaksanakan optimal sehingga bermanfaat dari manajer bidang pada institusi kegiatan berdasarkan asal kegiatan guna melihat kekurangan, supaya sesegera mungkin dapat perbaikan dari manajer sebagai pucuk pimpinan, guna terwujudnya capaian yang dirancang di awal.

Pakar lain (Victor dan Jusuf, 1994:21) mendeskripsikan mengawasi ialah cara melalui usaha pada saat mengerti seberapa jauh pengembanan amanat yang dijalankan sesuai prosedur serta target yang akan diraih. Sejalan dengan pakar diatas Hasley (1994:2) pengawasan ialah melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang bekerja supaya mereka menjalankan tugas yang dibebenkannya dengan baik. Menurut (Siagian, 2002:73) pengawasan melekat memiliki maksud sebagai instrumet guna merubah tingkah laku dari menyimpang, tidak hanya menjatuhkan efek jera. Sasaran utamanya adalah menemukan sesuatu tidak beres dalam pelaksanaan berbagai operasional dalam organisasi.

Berdasarkan penjabaran penulis menyimpulkan bawasannya mengawasi ialah cara guna mengawal aktivitas secara terkonsep guna mencapai keinginan

yang telah dirancang sejak awal dengan ketentuan yang berlaku sehingga jika terjadi penyimpangan agar mudah melakukan tindakan koreksi.

1.6.6.1 Tujuan Pengawasan

Setelah menguraikan mengenai definisi pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, di kemukakan bahwa maksud adanya kontrol menurut (Situmorang dan Juhir, 1994:26-27), yakni :

1. Supaya terwujudnya pegawai negara berwibawa serta bersih ditunjang dengan cara manajemen kenegaraan bermanfaat serta sukses didukung peran rakyat pondasinya serta pengendalian sebagai bentuk kontrol rakyat (*control trust*) secara obyektif, serta berkomitmen.
2. Supaya Terwujudnya ketertiban administrasi pada lingkup pegawai negara, peningkatan kedisiplinan sehingga kebaikan menciptakan kejelasan ketika mengemban amanat, peningkatan rasa berintegritas sehingga meminimalisir perbuatan menyimpang terhadap masyarakat serta kaidah agama. kemudian tujuan dari adanya pengawasan yakni :
 - a. Menjaga ketepatan kegiatan berdasarkan rancangan, peraturan serta amanat.
 - b. kedisiplinan kerjasama seluruh kegiatan.
 - c. Mitigasi ketidakefisienan serta penyalahgunaan wewenang.
 - d. Menjaga terciptanya pemenuhan jasa dan barang bagi masyarakat.
 - e. Mendorong kepuasan rakyat pada institusi.

Pada dasarnya tujuan akhir pengawasan memberikan untuk melakukan perbandingan kinerja berdasarkan standar, rencana dan tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya. Pada penjelasan ini mengemukakan bahwa tujuan pengawasan, yaitu menentukan apakah kegiatan tersebut telah dicapai, kemudian melakukan proses evaluasi berdasarkan data-data yang diperoleh, yang kemudian diambil sebuah tindakan-tindakan korektif untuk menjamin agar hasil sesuai yang telah direncanakan.

1.6.6.2 Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal, menurut (LAN, 1996:160) dalam sistem administrasi Negara Republik Indonesia di kembangkan empat klasifikasi pengontrolan :

1. WasKat, yakni kontrol dilaksanakan seluruh manajer pada seluruh lini dibawah unit yang dikomandoinya.
2. WasNal, yakni kontrol yang dilaksanakan pegawai di internal pemerintah yang mengemban amanat melakukan pengontrolan.
3. WasLeg, yakni kontrol yang dilaksanakan Institusi wakil rakyat dan biasanya merupakan kontrol dibidang politik
4. WasKat, yakni kontrol yang dilaksanakan masyarakat melalui lembaga swadaya dan media sosial yang berkembang saat ini..

1.7 Operasionalisasi Konsep

Stanfort Laboltitz dan Robert Hagerdon (1984) pengaplikasian ialah rincian serta tata cara dilihat dari cara yang dioptimalkan guna penjabaran maksud. Berlandaskan penjabaran ini dapat diketahui bahwa definisi pengaplikasian ialah penjelasan mendalam dalam struktur yang sudah dikategorikan pada variabel. Pengertian konsep adalah abstraksi tentang kondisi yang dirancangkan

berdasarkan pengelompokan berdasarkan beberapa spesifikasi peristiwa, kondisi himpunan atau perindividu.

berlandaskan dari permasalahan tersebut maka definisi pengaplikasian pada observasi yakni : evaluasi ialah pembuktian fakta serta kesuksesan berkaitan pada kegiatan yang didalamnya terdapat penentuan lokasi, metode penentuan standar dan cara mengkaji sehingga mendapatkan suatu maksud secara eksplisit sehingga memiliki manfaat guna menolong penyempurnaan kemajuan dalam kegiatan. Ukuran yang dipakai ketika evaluasi, yakni :

1. Efektifitas, yaitu: apakah output sudah terwujud senada dengan rancangan awal ?
2. Kecukupan, yaitu: apakah output sudah memuaskan kebutuhan ?
3. Perataan, yaitu: apakah output atau kebermanfaatan salurkan secara menyeluruh pada obyek pemeriksaan ?
4. Responsivitas, yaitu: seberapa besar output digapai dan respon dari seluruh obyek pemeriksaan.
5. Ketepatan, yaitu: apakah output pada kegiatan sudah berarti atau berguna.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Singarimbun dan Sofian Efendi (2008:4) menyatakan bahwa cara observasi memiliki bertujuan guna mengetahui secara tepat tentang keadaan. manfaat mendapatkan fakta nyata dirumuskan di persoalan serta maksud observasi adalah

diperlukan sebuah kerangka menyeluruh perihal tata cara kegiatan observasi berada di aplikasi cara ilmiah, perincian gambaran ketetapan saringan berlandaskan fakta pendukung ilmiahnya.

Observasi kualitatif merupakan observasi penjabaran untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi pada subyek observasi. berlandaskan sudut pandang, serta memakai bentuk kata, pada tatanan secara tersendiri secara natural yakni memaksimalkan seluruh cara alami. Pada pelaksanaan ini menggunakan cara observasi kualitatif. observasi kualitatif berlandaskan fakta berbentuk kata, abstraksi,serta tidak hanya angka. kalau terdapat angka, cuma bersifat pendukung. Observasi kualitatif bertujuan bukan hanya mencari asal muasal, namun memiliki maksud upaya untuk mendalami keadaan. serta meneruskan dan memperdalam keadaan dengan menjabarkan masalah dan menarik benang merah campuran berdasarkan beberapa permasalahan di prsentasikan (Moloeng, 2007:11). Selain berkeinginan aspek cara serta bermaksud mengetahui cara pendukung TLHP ItProv Jawa Tengah, penelitian ini juga memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Pada dasarnya tipe penelitian di bagi menjadi dua jenis, yang dipresentasikan oleh observer, berikut :

1. Observasi Deskriptif ialah sebuah kegiatan dalam memecahkan persoalan menggunakan cara perbandingan kondisi sekarang, menginisiasi kategori kondisi, dan memutuskan efek antara keadaan di area tersebut.

2. Observasi Eksploratif, ialah sebuah observasi yang dioperasikan guna memperinci ilmu tentang fenomena, sehingga dapat merencanakan persoalan lebih mendalam.

Observasi ini bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan kondisi daerah yang belum diharapkan ItProv Jawa Tengah sebagai rujukan observasi mengenai proses TLHP. Cara yang dioptimalkan ketika observasi ialah cara observasi kualitatif eksploratif. Observasi kualitatif eksploratif ditujukan guna mendapatkan penjabaran berdasarkan pertanyaan di perumusan persoalan. Observasi kualitatif eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan guna menghimpun fakta tentang situasi, atau kondisi saat ini, yakni kondisi terjadi menurut observer ketika observasi berlangsung.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan bidang utamanya Manajemen Evaluasi. Penentuan lokasi ini karena setiap penelitian kualitatif bersifat mengharuskan peneliti sering terjun di lapangan. Selain pemilihan situs penelitian instansi tersebut karena Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ialah institusi pengawal kegiatan pemerintah kabkot di tingkat provinsi memiliki posisi rendah dan mengharuskan memiliki laporan pada pimpinan provinsi serta lebih rinci administrasi mendapat pembinaan dari Sekertaris daerah. Disisi lain, aspek aksesibilitas dan memberikan kesempatan yang cukup karena penelitian tidak mungkin jika dilaksanakan dalam kurun waktu satu kali saja, ada pula faktor lain yang harus diperhatikan seperti keterbatasan

waktu, biaya, pemikiran yang menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melaksanakan pemilihan lokasi penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Informan dapat dikatakan seorang individu yang dilihat mengerti untuk memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. pemilihan narasumber ketika observasi kualitatif dilaksanakan pada saat observer memasuki area dan semasa observasi berjalan. Metodenya, yakni observer menentukan pegawai yang sudah diperhitungkan guna menjabarkan informasi yang dibutuhkan, kemudian fakta yang telah didapat berasalkan informan pendahulu, observer menentukan informan selanjutnya orang diperhitungkan akan menjabarkan rekomendasi fakta sangat akurat.

Penentuan informan tersebut dari Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono 2009:219) dinamakan metode bulatan salju, yakni penentuan pemberi informasi dari yang kecil sehingga diharapkan dapat meluncur kemudian semakin lama dapat semakin luas. Mula mula pilih seorang atau beberapa informan, selanjutnya guna memperoleh fakta lainnya guna melengkapi observasi maka diperlukan pencarian informan lain yang sekiranya berkompeten untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Informan yang akan ditentukan semakin lama terarah seiring dengan semakin terarahnya fokus observasi.

observer ketika melakukan observasi harus merincikan pihak-pihak sekiranya dipakai untuk asal informasi dan pemberi informasi. Sumber informasi penelitian tentang Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggunakan dua sumber informasi, yaitu informan utama dan sumber

informasi triangulasi. Informan Utama ialah seorang pemberi informasi (informan) yang dianggap mahir mengenai masalah penelitian dan sekaligus seorang pihak sebagai pelaksana kebijakan, dalam hal ini informan utama dalam penelitian adalah pihak Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain Informan utama, terdapat sumber informasi lain, yaitu informan triangulasi sebagai pemberi informasi yang digunakan untuk *cross check* informasi dari informan utama. Pemberi informasi tersebut adalah seorang pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada bagian Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan situs *website* yang dimiliki Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Penelitian kali ini peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi dari narasumber utama tetapi juga harus mencari informasi dari sumber lain, yaitu informan triangulasi guna *cross check* informasi yang didapat.

Pandangan lain dalam pemilihan informan menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2009:221) menjelaskan bawasannya pemberi informasi semestinya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki keahlian dan paham.
2. Terklasifikasi pada kegiatan yang bersangkutan dan terjun secara langsung saat program sedang diobservasi.
3. Memiliki banyak periode luang guna digali keterangan.
4. Asal mulanya terklasifikasikan belum mengenal dengan penelitian berefek pada menggairahan guna dioptimalkan sebagai narasumber/informan.

Syarat informan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan arahan informan utama untuk menentukan informan lain guna mendapatkan data secara lengkap adapun untuk mencari opini atau pendapat informasi lain dari seseorang yang berbeda (dalam Sugiono, 2009:221) mengungkapkan bahwa perolehan informasi dianggap tuntas manakala datanya sudah jenuh, yaitu dari banyak informan yang diminta tentang informasi sudah tidak memberikan data yang baru lagi.

1.8.4 Jenis Data

Dalam observasi kualitatif eksploratif, klasifikasi informasi akan dipakai yakni teks, rangkuman, frasa-frasa, kutipan tertulis sehingga dapat mempresentasikan seseorang, perilaku dan keadaan yang terjadi dalam lingkungan sosial Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pada sisi lain, juga dipergunakan data statistik yang bermanfaat untuk mendukung data kualitatif yang telah ada.

1.8.5 Sumber Data

Subyek yang menjadi asal mula informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Data Utama, yaitu informasi didalamnya terdapat fakta yang telah diperoleh sesuai asalnya. Pada observasi informasi didapatkan berasal dari sesi Tanya jawab dengan narasumber, sumber informasi utama pada observasi ialah Kassubag Perencanaan, Kassubag Evaluasi dan Pelaporan, Staff Perencanaan dan Staff Evaluasi dan Pelaporan.
2. Data minor, yaitu informasi yang didapat berlandaskan bahan informasi lain serta studi pustaka yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada kali ini peneliti hanya bertindak pada

pemakaian data. Data sekunder dapat diperoleh melalui koran, buku, Sistem Pengawasan (SimWas), tinjauan pustaka, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan arsip-arsip lain sesuai pada observasi dan data-data yang telah tergarap dari ItProv Jawa Tengah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, cara penghimpunan informasi yang digunakan yakni :

1. Penelitian litelatur

Penelitian kepustakaan adalah penghimpunan informasi menggunakan cara mempelajari buku, makalah yang bermanfaat untuk mendapat fakta sejalan dengan kaidah-kaidah dan penjabaran sesuai dan berhubungan pada permasalahan penelitian sehingga dijadikan pedoman bagi penganalisa data primer dan untuk mendukung dan memperkuat pembahasan masalah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian di lapangan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap objek yang diamati, melalui :

a. Wawancara mendalam

Wawancara adalah proses penghimpunan data berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya. Wawancara menjadi sebuah proses komunikasi dan interaksi. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu informan dan pewawancara, tema observasi yang termuat dala susunan

persoalan didalam sesi Tanya jawab (dalam Singarimbun dan Effendi, 2008:192).

Wawancara dilaksanakan dengan wawancara secara lebih lanjut, hal ini diperlukan agar informasi yang diperoleh semakin terinci. Wawancara lebih lanjut dilaksanakan langsung kepada seorang informan atau dapat berupa *focus grup discussion*, tergantung pada awal perjanjian dengan informan, pada penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga dapat memungkinkan responden untuk mengutarakan jawaban secara lebih luas.

b. kearsipan

kearsipan merupakan pengutipan informasi melewati arsip-arsip. Desain kearsipan dipakai guna mengumpulkan data dari sumber dokumen yang dimungkinkan membantu bahkan dapat berlawanan dengan hasil setelah wawancara. Cara ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang berasal dari arsip atau dokumen.

Desain dokumentasi dilakukan guna memenuhi informasi yang didapat dari wawancara. Informasi yang didapatkan dapat berupa rekaman dan tulisan seperti laporan resmi, notulensi, catatan harian dan buku buku. Pada penelitian ini, cara dokumentasi dilaksanakan dengan cara pengumpulan dokumen resmi yang berhubungan dengan TLHP di ItProv Jawa Tengah.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

1.7.7.1 Analisis Data

Pada observasi kualitatif, analisis data sejak dini observasi harus dilakukan dan semasa observasi. Informasi didapat, selanjutnya dihimpun guna digarap dengan terstruktur, diawali dari observasi, wawancara, mengklarifikasi, mereduksi, dan mengedit, kemudian aktivitas penyajian informasi dan menyimpulkan informasi. Metode pengkajian informasi pada observasi memakai model penjabaran berkesinambungan (dalam Miles dan Huberman 2007:15-21).

Analisis data model interaktif, terdiri dari :

1. Reduksi Data

Melalui letak pengobservasian, informasi di arena dimasukkan pada penjabaran keterangan yang terinci serta lengkap. Informasi serta keterangan kemudian dikerucutkan, diringkas yang kemudian akan dipilah-pilah hal yang penting saja, hal ini bertujuan agar dapat terfokuskan kemudian dipilih sesuai dengan tema. Pengerucutan informasi data dilaksanakan secara berkelanjutan ketika proses observasi sedang dilaksanakan. Tahapan setelah informasi dipilah harus dilugaskan, informasi yang bukan berhubungan serta dipergunakan dapat dipilah bertujuan memberikan kelugasan ketika mempersembahkan pengutaraan dan berguna menarik kesimpulan yang bersifat sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data bermaksud supaya dapat memudahkan untuk pengkajian agar terlihat sketsa dengan komprehensif serta bagian-bagian dari informasi tentang observasi. Fase ini adalah salah satu tatanan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga nampak terlihat secara jelas dan utuh. Data tersebut kemudian dipisah dan disisikan guna disortir yang kemudian akan ditata sesuai dengan jenis untuk diperlihatkan supaya sejalan dengan persoalan yang sedang dihadapi, termuat kesimpulan-kesimpulan sementara yang didapat saat waktu data sedang direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Observasi kualitatif, prmbuktian informasi dilaksanakan dengan berkelanjutan seiring cara observasi dilaksanakan. Dari sejak awal di lokasi penelitian hingga proses penelitian. Peneliti mengupayakan untuk menganalisa serta memecahkan maksud dari informasi yang telah didapatkan hingga disatukan, yakni mengobversi bentuk tema, jalinan serupa, hipotesa serta kemudian diaplikasikan hingga membentuk inti yang bersifat *tentative*. Pada tahappan guna mendapatkan benang merah berlandaskan klasifikasi informasi yang telah di olah hingga mendapatkan bahan yang kemudian ke arah inti penyelesaian dan dapat memenuhi persoalan yang ada, namun informasi dapat bertambah melewati pembenaran dengan lebih luas hingga didapatkan inti bersifat valid.

Dapat dikatakan, masing-masing kesimpulan senantiasa dapat selalu dilaksanakan verifikasi selama penelitian sedang berlangsung dengan melibatkan interpretasi peneliti. Analisis data adalah kegiatan logis, data kualitatif berasal dari sudut pandang tertentu terhadap fenomena yang sedang terjadi, terdapat beberapa data kualitatif yang berisikan dari angka-angka guna mendukung adanya persentase yang memiliki kesinambungan dengan efek yang berhubungan atas inti persoalan. Guna memperoleh suatu hubungan penyilangan yang memberikan klarifikasi pada analisis proses TLHP ItProv Jawa Tengah.

Ketiga unsur saling berinteraksi hingga didapat kesimpulan akhir yang benar, jika kesimpulan belum memadai maka harus dilakukan pengujian ulang, yakni dengan mencari kembali beberapa data yang ada di lapangan, kemudian dicoba guna diintegrasikan atas pusat yang lebih jelas. Maka dari itu, penjabaran dari efek yang telah didapat ialah cara interaksi yang melibatkan tiga unsur analisis dengan pengumpulan data dan bagian dari siklus hingga dengan kegiatan penelitian berakhir.

1.7.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data dilaksanakan secara koheren, sejalan dengan dilaksanakannya data, untuk mencari hubungan-hubungan yang tampak dari data yang sudah terkumpul. Langkah ini bertujuan untuk melakukan deskriptif analisis.

1.7.8 Kualitas Data

Mutu fakta observasi kualitatif didapat melewati analisis *historical situatedness* (sejauh mana penelitian mengumpulkan data hasil serta menganalisa jawaban dari sumber informasi). Cara yang digunakan untuk menguji mutu data

merupakan metode triangulasi, yakni metode pengamatan fakta guna keperluan pengkoreksian sejauhmana cara serta efek yang didapat sudah dihayati secara nyata pada penulis yang berlandaskan pada maksud dari informan. Cara yang diperoleh dapat dijalankan, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sesi tanya jawab pada narasumber.
- b. Melaksanakan percobaan komparasi dari data yang didapat dari narasumber pada efek penelitian di lapangan.
- c. Memberitahukan efek yang didapat pada narasumber serta asal muasal.